

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik sangat pesat sehingga pemerintah mulai memperhatikan penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan. Pemerintah menyediakan organisasi sektor publik yang salah satu tugasnya yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat di setiap wilayah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kinerja yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat dan diharapkan tanggap dengan lingkungannya, sebab kinerja organisasi layanan publik yang optimal mampu membantu pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah berwenang atas pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya oleh masing-masing organisasi pelayanan publik untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Dengan dikelolanya pelayanan publik yang baik dan bertanggungjawab, organisasi publik mampu memberikan pemasukan kas pada pemerintah daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan organisasi yang profesional dapat meningkatkan kinerja dan mampu mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Prasetyantoko (2008) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu ditetapkan prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi). Prinsip akuntabilitas

dan transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*. Melalui informasi yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan memudahkan publik untuk memahami serta ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik (Iswahyudi Aries, dkk., 2016).

Pada saat ini masyarakat memberikan tuntutan kepada organisasi sektor publik untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Mardiasmo (2009) menyatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik wajib mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya kepada publik agar meningkatkan kinerja organisasi layanan publik (Mardiasmo, 2009).

Transparansi juga menjadi elemen penting bagi kinerja organisasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transparansi dapat didefinisikan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan bagi setiap orang yang membutuhkan. Informasi tersebut meliputi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai. Informasi tersebut diharapkan mampu diakses atau didapatkan oleh

masyarakat dengan baik dan terbuka (Mardiasmo, 2009). Oleh karena adanya pelayanan publik yang transparan, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan organisasi dinilai memiliki kinerja yang baik.

Partisipasi publik juga perlu dilaksanakan sebagai peningkatan peran masyarakat dalam berbagai kebijakan publik dengan menyalurkan aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, diharapkan mampu membantu pelaksanaan pembangunan di daerah. Apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan daerah, maka hak mereka dapat dipenuhi dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan (Mardiasmo, 2009).

Kinerja organisasi layanan publik pada pemerintahan sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti halnya rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah sebagai penyedia pelayanan kesehatan juga memiliki permasalahan pada kualitas pelayanan umum yang belum optimal. Pada saat ini, masih sebagian sarana pelayanan kesehatan dapat melaksanakan standar pelayan yang telah ditetapkan. Disisi lain, beberapa tenaga kesehatan belum memenuhi kompetensi profesi terkait untuk dapat dinilai sebagai tenaga kesehatan profesional. Organisasi kesehatan tengah mengalami tekanan untuk memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya (Bastian Indra, 2008).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 545 Tahun 2011, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tipe B Non Pendidikan milik pemerintah

daerah yang berwenang melaksanakan pelayanan kesehatan. Pada tanggal 25 Mei 2016 RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1148/2016 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta (Widiyati Wiwik, 2016). Kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo selama ini sudah cukup baik, namun masih ditemukan beberapa masalah terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. Segala aktivitas yang dilaksanakan rumah sakit sebagai penyedia pelayanan dan segala aspek pengelolaan organisasi tersebut masih sering dipertanyakan pertanggungjawabannya oleh masyarakat.

Seperti yang dilansir dalam sebuah berita media masa online yang menyatakan bahwa fenomena-fenomena yang dirasakan masyarakat saat ini adalah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang belum jelas (Sidak DPRD, 2016), pelayanan terhadap beberapa masyarakat yang berada pada golongan menengah kebawah terkesan dinomor duakan, tenaga medis dirasa belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya (Madiun Pos, 2016), kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi yang diberikan dari pihak rumah sakit kepada masyarakat, serta sedikitnya kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung (Berita Jatim, 2016).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah diterapkan saat ini, RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo diharapkan mampu

memperbaiki pelayanan publik baik dari segi manajemen maupun operasional yang sebelumnya belum dijalankan secara maksimal dengan memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan pemerintah dengan ukuran yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah serta menyediakan pelayanan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga kinerja organisasi layanan publik mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Dengan berlatarbelakang uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP KINERJA ORGANISASI LAYANAN PUBLIK DI RSUD DR. HARJONO KABUPATEN PONOROGO”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tentang akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan kinerja organisasi layanan publik. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo?
- b) Bagaimana transparansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo?
- c) Bagaimana partisipasi publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo?
- d) Bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah variabel diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.
- b) Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.

- c) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.
- d) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi layanan publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya sebagai berikut :

- a) Bagi organisasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan evaluasi terhadap organisasi pelayanan publik agar bisa meningkatkan kinerjanya secara terus menerus.
- b) Bagi penulis, diharapkan mampu memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan setelah melakukan penelitian ini.
- c) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk menambah wawasan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar.